

Studi Perdagangan Anak Perempuan Di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu

Windia Sari Sunardiyana
windi_windia@yahoo.com

Agus Joko Pitoyo
jokokutik@yahoo.com

Abstract

Human trafficking is a complex issued because majority over the victims are the under-ages girl which don't have their rights as a child. The reaserch conducted in Sub Bongas was focused to identify factors effected those girls easily trapped in trraficking, trafficking mechanism and violence experienced throughout trafficking. This reaserch used qualitative methods, snowball technique method for the inclusion of respondents and triangulation analysis use to determine the validity of data that obtained in this research. Low education and economic problems trigger for girls to entangle. They were become victim indebted and deceit by the brokers, not all girls have the same trafficking mechanism. At the stage of acceptance there sexual violence was the most frequently experienced by the victims because the girls under 18 mostly working as sex worker.

Keywords: Trafficking, Mechanism, Violence, Girl under-age

Abstrak

Perdagangan manusia menjadi sangat penting karena mayoritas korban adalah anak-anak perempuan dibawah umur yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bongas dengan fokus penelitian untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan anak-anak perempuan terjat dalam *trafficking*, mekanisme *trafficking* yang terjadi dan kekerasan apa saja yang mereka alami selama menjadi korban *trafficking*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tehnik *snowball* untuk pencakupan responden dan analisis triangulasi digunakan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian. Rendahnya pendidikan dan permasalahan ekonomi menjadi pemicu anak-anak perempuan untuk terjat. Cara mereka dijerat adalah dengan modus penjeratan hutang dan penipuan yang dilakukan oleh para calo, tidak semua anak perempuan mengalami mekanisme perdagangan dengan cara yang sama. Pada tahap penerimaan kekerasan seksual sangat banyak dialami korban karena mayoritas anak perempuan bekerja sebagai Wanita Pekerja Seks.

Kata Kunci: *Trafficking*, Mekanisme, Kekerasan, Anak Perempuan

PENDAHULUAN

“Kayaknya enak gitu kerja kaya gitu (wanita malam) bisa dapet banyak duit jadi saya sendiri yang minta ikut”. (Tr, Mantan Korban *Trafficking*)

Ketertarikan Tr untuk bekerja sebagai wanita malam dilakukannya ketika usianya masih belia yaitu 14 tahun, dengan berani Tr menyatakan niatnya untuk bekerja ke temannya, niat Tr kemudian disampaikan ke calo yang membawa temannya itu. Tak menunggu lama kemudian calo tersebut mendatangi rumah Tr dan menawarkan pekerjaan tersebut.

Hasil wawancara diatas merupakan gambaran betapa berkembangnya *trafficking* di Kecamatan Bongas sehingga anak perempuan justru berkeinginan menjadi wanita malam. *Trafficking* sepertinya sudah menjadi jalan pintas pemenuhan ekonomi. Sangat miris jika melihat kenyataan bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak dan *trafficking* tetapi di Kecamatan Bongas kasus ini masih banyak terjadi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk menetapkan batas minimum usia anak dalam bekerja dan Indonesia mendeklarasikan batas minimum 15 tahun usia diperbolehkan bekerja (Hardius Usman dan

Nachrowi, 2004). Namun, pada pokok-pokok konvensi disebutkan bahwa pekerjaan berat yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak memiliki batas minimum usia yang berbeda yaitu 18 tahun, dalam hal ini korban perdagangan anak termasuk kedalam pekerjaan berat dan membahayakan.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 88 menerangkan bahwa orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak, dan juga melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap anak akan dikenai denda maksimal Rp200.000.000, sedangkan orang yang melakukan tindakan kekerasan, termasuk penyiksaan akan diancam hukuman tiga tahun dan enam bulan atau didenda maksimal Rp72.000.000 hal ini tertera pada pasal 80. Hukuman ini akan semakin berat jika tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak juga semakin parah. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang mengakibatkan masih banyak lapangan kerja formal ataupun informal yang mempekerjakan anak dibawah umur. Jika Undang-Undang ini terus diabaikan maka permintaan pasar kerja terhadap pekerja anak juga akan terus meningkat dengan memanfaatkan permasalahan ekonomi yang terjadi.

UUPTPO (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) seharusnya lebih diimplementasikan pemerintah sehingga tidak terjadi eksploitasi pekerja anak terutama perdagangan anak perempuan. Selain itu,

pemerintah Kabupaten Indramayu telah memberlakukan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Pencegahan dan Pelarangan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, tetapi Indramayu tetap saja termasuk kedalam salah satu kabupaten dengan kasus perdagangan anak perempuan yang cukup tinggi di Indonesia.

Penelitian ini kemudian dilakukan dengan tujuan untuk Mengetahui secara langsung apa saja yang melatarbelakangi anak perempuan sehingga mereka terjerat dalam perdagangan anak, mengkaji mekanisme/proses yang terjadi ketika anak perempuan tersebut akan diperdagangkan, dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama anak perempuan tersebut diperdagangkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik bola salju (*snowball*), keberadaan informan ini akan didapat melalui pengumpulan informasi yang berawal dari kelompok kecil kemudian secara berantai dapat diperoleh informasi yang lebih luas mengenai keberadaan informan lainnya. Perdagangan anak perempuan merupakan hal yang sangat sensitif, sehingga perolehan data cukup sulit dan dapat melibatkan banyak pihak.

Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dari berbagai sumber dilakukan secara terus menerus hingga data tersebut jenuh

(Sugiyono, 2010). Analisis keabsahan data dengan metode triangulasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara informan dengan hasil wawancara tidak terstruktur. Triangulasi metode tidak hanya menggunakan satu metode dalam proses pengumpulan data tetapi juga menggunakan metode observasi sebagai bukti dan memastikan apakah informasi yang diberikan informan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sedangkan triangulasi data membandingkan informasi yang didapatkan dibandingkan dengan data sekunder yang telah didapatkan untuk dicek kebenarannya.

Data yang sudah dicek keabsahannya kemudian direduksi yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2010). Data yang telah direduksi dan dikategorisasikan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“Saya ditawarkan kerja oleh ayah tiri saya sebagai waitress di Jepang dengan gaji bisa 20 jutaan per bulan, kemudian ayah tiri saya mengenalkan saya kepada temannya yang akan membawa saya bekerja, pada saat itu saya tidak tahu jika saya dijual”. (RA korban *trafficking*)

Berbagai permasalahan menjadi pemicu anak-anak dibawah umur mudah terjatir salah satu alasannya adalah rendahnya perlindungan dan kontrol sosial dari masyarakat serta keluarga. Maka tidak heran jika mereka malah diperdagangkan oleh keluarganya sendiri, dengan dalih permasalahan ekonomi, seperti korban perdagangan RA yang dijual ayah tirinya.

Kondisi ini sudah menjadi hal biasa terutama di Kecamatan Bongas, *trafficking* sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Mayoritas bahkan menggantungkan nasibnya pada *trafficking* entah sebagai korban, geromo ataupun calonya. Sebagian dari mereka yang menjadi korban pun tidak merasa bahwa dirinya adalah korban mereka sudah menikmati pekerjaan mereka bahkan ada pula yang menawarkan diri dan ketika mereka sudah terjatir akan sulit terlepas dari permasalahan ini.

Anak-anak perempuan yang rentan terjatir *trafficking* merupakan anak-anak yang umumnya memiliki orangtua dengan pendidikan rendah, kondisi ekonomi yang sulit dan keluarga yang kurang harmonis. Lingkungan yang seperti ini menjadikan anak rentan menjadi korban, rendahnya pendidikan menjadikan mereka minim informasi sehingga mereka mudah untuk ditipu dan diiming-imingi oleh calo atau geromo. Pola hidup yang konsumtif dan ingin kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara instan menjadikan mereka memiliki motivasi belajar yang minim, untuk itu mereka lebih

memilih pekerjaan yang tidak membutuhkan syarat yang rumit dan mampu menghasilkan uang banyak.

Mayoritas korban *trafficking* di Kecamatan Bongas adalah anak perempuan berusia 14 tahun hingga 17 tahun, usia tersebut adalah usia dimana anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan orangtua memiliki kewajiban mendampingi anaknya untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar yang diprogramkan oleh pemerintah. Usia tersebut menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang terjatir menjadi korban *trafficking* hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak tamat SD, seperti halnya korban berinisial Tr

“Kebetulan saya tidak sekolah dulu pernah tapi hanya sampe kelas 3 SD saja. Mungkin dulu juga dari lingkungan keluarga juga tidak ada yang sekolah tinggi. Jadi waktu kecil saya berfikirnya, ya sudahlah kakak saya, saudara saya, bapak saya tidak sekolah ngapain saya sekolah. Jadi berfikirnya tuh tidak ke depan nggak sekolah juga nggak jadi masalah ini kok. Jadi bukan karena orangtua tidak ada biaya atau orangtua tidak mau membiayai, mungkin orangtua juga akan berusaha membiayai jika saya niat sekolah tapi saya tidak ingin sekolah”

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPKB Kabupaten Indramayu bahwa mayoritas anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak berjenis kelamin perempuan dengan usia di bawah 18 tahun, sebelum terjatir mereka tidak memiliki pekerjaan dengan status

perkawinan terbanyak adalah menikah. Status menikah ini didapatkan agar mereka dianggap dewasa dan orangtua sudah tidak sepenuhnya mengontrol mereka. Kecamatan Bongas merupakan Kecamatan di Indramayu dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak berdasarkan data Kabupaten Indramayu dalam angka pada tahun 2012 terdapat 57 anak yang putus sekolah, 2 anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat dan sebanyak 55 anak tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA/ sederajat. Anak-anak yang putus sekolah inilah yang rentan menjadi korban perdagangan anak.

Tabel Karakteristik dan Faktor Terjerat Korban Trafficking di Kecamatan Bongas

Nama	Usia diTraffic	Pendidikan	Jumlah Saudara	Pekerjaan Orangtua	Faktor Terjerat
Tr	14 tahun	Tidak tamat SD	2	Jaragan Tandur	Faktor ekonomi dan lingkungan
S	16 tahun	Tamat SD	5	Jaragan tandur dan dagang buah ketika ada hajatan	Faktor ekonomi dan stress ditinggal suami
RA	16 tahun	Tamat SMP	1 (Adik tiri)	Ibunya bekerja sebagai WPS	Ditipu oleh ayah tiri dan terjerat hutang
R	17 tahun	Tamat SD	3 (Adik tiri)	Jaragan tandur	Faktor ekonomi, ingin merenovasi rumah

Berdasarkan pengakuan calo yang merekrut anak-anak perempuan rata-rata memang keluarganya berada di ekonomi yang sulit dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Kutipan hasil wawancara dengan calo:

“Ya biasa yang saya ajak yang nggak mampu jadi keluarganya ini ya sangat payah lah, bapaknya ini kawin lagi ibunya janda punya anak, ibunya perlu makan jaragan tandur motong padi keliling desa ya capek sedangkan anak udah gede SMP kelas 2 pada berhenti bantu orangtuanya kadang membiayai adiknya sekolah, kadang juga kakaknya dibiayain, ada juga yang ingin menyenangkan orangtua sampai sekarang udah bangun rumah punya motor vario sampai temen-temennya pengen ikut juga begitu. Rata-rata yang saya ajak emang tidak mampu, lulus SMP nggak ngelanjutin sekolah atau malah berhenti mau kita cegah juga kita nggak ngasih makan. Kalo sekarang yang dibawa ABG dari umur 16an sampai 20 tahun”

Proses perekrutan perdagangan anak terjadi sangat mudah di Kecamatan Bongas karena pelakunya sendiri adalah orang-orang di sekitar mereka seperti keluarga, tetangga atau teman sendiri dengan modus penjeratan hutang dan iming-iming gaji tinggi. Pekerjaan ini memang sangat merubah kondisi ekonomi mereka sehingga *trafficking* menjadi jalan pintas pemenuhan ekonomi. Orang yang sudah terjerat dan terlibat dalam *trafficking* sangat sulit untuk dihentikan karena penghasilan dari pekerjaan ini yang sangat tinggi.

Anak perempuan dibawah umur yang berhasil direkrut kemudian diangkut, dilengkapi syarat-syarat kerja yang kurang dan kemudian diserahkan ke calo yang lain. Jika lokasi kerja di luar negeri maka akan terjadi pemalsuan dokumen yang

dilakukan oleh oknum-oknum yang merekrut korban.

Pemalsuan dokumen yang terjadi pada proses pemindahan banyak terjadi sebelum tahun 2005 mereka memalsukan umur korban yang belum cukup umur untuk bekerja agar dapat memenuhi syarat kerja. Pemalsuan dokumen semakin jarang terjadi karena munculnya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan Perda Kabupaten Indramayu mengenai *Trafficking*, sehingga jika ada pemalsuan dokumen dengan memalsukan identitas maka akan ditangani dengan UU *Trafficking*.

“Biasanya dibuat dia belum 23 tahun dibuatkan dokumen padahal dia masih anak umur 16 tahun itu masuk ke *trafficking* kalau sudah pemalsuan identitas kami menggunakan UU pemberantasan perdagangan orang” (Bu Dwi, Kanit PPA Indramayu)

yang identitasnya dipalsukan adalah RA dan R, pada saat itu usia RA belum mencukupi untuk bekerja karena masih berusia 16 tahun sedangkan R berusia 17 tahun identitasnya dipalsukan oleh calo yang mengajak RA untuk bekerja di Jepang. RA harus menunggu proses pembuatan surat selama 1 bulan di tempat penampungannya di Mangga Besar. R walaupun sudah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki KTP sehingga identitasnya dipalsukan ketika hendak bekerja ke Malaysia. Proses pemalsuan dokumen yang terjadi dilakukan oleh calo-calo *trafficking* langsung dan tidak dilakukan oleh perangkat-perangkat desa atau jajarannya, selain itu Pak

Iskak selaku Camat Bongas juga mengatakan bahwa banyak perangkat pemerintah yang sudah mengetahui ancaman hukuman jika membantu warga memalsukan identitas yaitu ancaman hukuman 5 tahun penjara dan juga ancaman kehilangan pekerjaan.

Proses pemindahan korban lebih banyak menggunakan jalur darat dan jalur laut karena prosedur keberangkatannya tidak serumit jalur udara hal ini dikatakan oleh Ibu Dwi Kanit PPA sehingga jalur udara jarang sekali dipakai untuk memberangkatkan korban. Seperti R yang dipekerjakan di Malaysia, ia berangkat hingga Pontianak menggunakan pesawat tetapi perjalanan dilanjutkan dengan bis umum menuju Malaysia

“Saya mulai perjalanan ke Malaysia dengan bis umum ke Jakarta, sampai Jakarta ke Pontianak menggunakan pesawat. Di Pontianak langsung terus ke Malaysia naik bis umum”. (R Korban *Trafficking*)

Berdasarkan pengakuan calo ia lebih sering membawa korban-korban dengan menyewa mobil, semua biaya sewa dan keberangkatan ditanggung oleh geromo. Bahkan para korban sebelum berangkat diberi uang untuk biaya perawatan agar lebih cantik Kondisi lapangan kerja yang monoton dan tanpa peningkatan inilah yang menurut calo banyak yang terlibat dalam *trafficking*.

Mekanisme penerimaan anak perempuan usia dibawah 18 tahun dipekerjakan sebagai wanita pekerja seks setelah tiba di lokasi mereka

diserahkan ke geromo seperti halnya korban perdagangan Tr, S dan RA sedangkan R bekerja sebagai pelayan di rumah makan. Dokumen dan identitas mereka semua ditahan oleh majikan ketika mereka sampai kecuali Tr yang tidak ada penahanan dokumen.

R ditawarkan pekerjaan oleh orang yang tidak dikenal, walaupun begitu R memperoleh informasi yang benar bahwa ia akan bekerja di sebuah kedai makan, namun sesampainya di lokasi kerja semua dokumen R yang dibawa oleh calo diberikan ke majikan R. Setiap harinya R bekerja dari jam 6 pagi hingga jam 7 sore, ia bekerja selama 13 jam dan kemudian setelahnya ada pergantian tugas. Seorang anak memang diperbolehkan bekerja tetapi batasan maksimum anak bekerja adalah 20 jam dalam seminggu (Hardius Usman dan Nachrowi, 2004). Selama bekerja R tidak pernah mendapatkan kekerasan dari majikan bahkan ketika R sakit majikan membawanya ke klinik untuk

Tr yang dari awal sudah tahu pekerjaannya sebagai wanita malam setiap hari bekerja dari jam 9 malam hingga jam 2 pagi upahnya dihitung berdasarkan sekali *booking* dalam sehari yaitu Rp200.000,- sedangkan geromo akan menerima Rp20.000 dari setiap pekerjaannya. Penggunaan alat komunikasi tidak dilarang dan tidak dibatasi. Tr tinggal di mess, lingkungan tempat tinggalnya diperumahan sederhana, setiap malam Tr bekerja di diskotik dan tidak ada hari libur kecuali jika Tr sakit atau menstruasi.

Mekanisme penerimaan S juga tidak jauh berbeda dengan Tr namun sertifikat tanah S harus disita sebagai jaminan agar ia terus bekerja karena orangtua S diberi kasbon uang 5 juta. Setiap hari S bekerja dari jam 6 sore hingga jam 2 pagi ketika di Jakarta dalam sehari ia bisa melayani 7 orang namun ketika pindah di Indramayu ia sehari hanya melayani 4-5 orang. Kekerasan dari majikan tidak S alami, kekerasan banyak didapat ketika melayani tamu.

“Sering mb pelanggannya ada yang suka main kasar, saya sampai pingsan tapi itu dulu awal tapi lama-lama biasa saja Kalau dari mami sih nggak ada yang kasar malah perhatian, pernah juga selisih paham tapi tidak sampai berlarut-larut. Kalau sama teman ya paling rebutan pelanggan tapi ya dibawa *enjoy*”.

Selain perbedaan jumlah pelanggan antara Jakarta dan Indramayu, upah juga berbeda. Di Indramayu tarif menemani hanya Rp50.000,- sedangkan jika *full* pelayanannya Rp.200.000,-. Di Jakarta hanya menemani saja Rp85.000 dan jika *full* bisa sampai Rp250.000 kadang juga ada tips dari pelanggan. Mami mendapatkan uang dari sewa ruangan untuk minum dan joget serta penjualan minuman dan rokok.

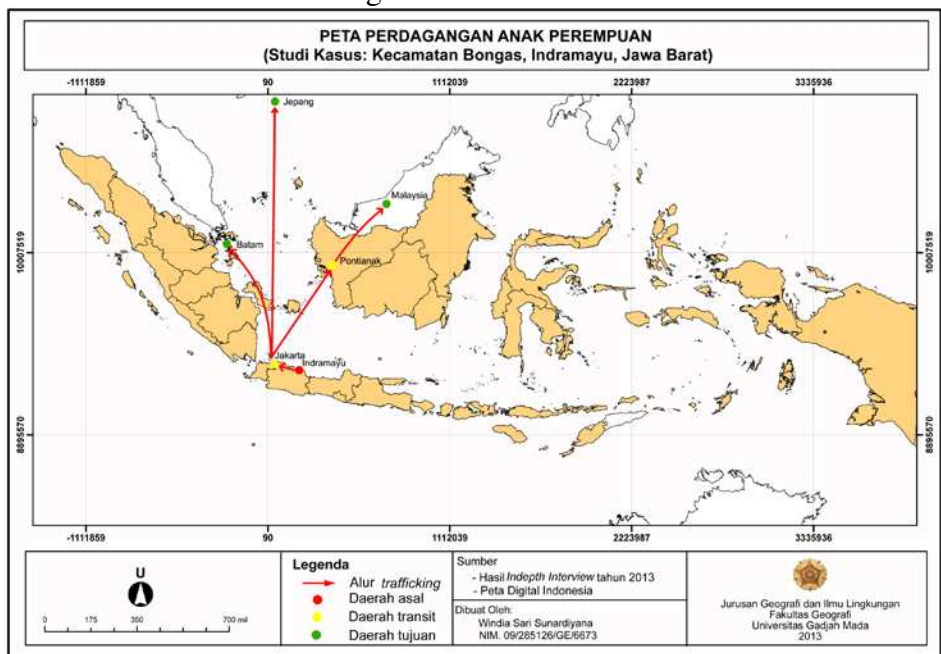
Mekanisme penerimaan RA berbeda dengan korban-korban yang lain. RA bekerja di Jepang awalnya ditawarkan sebagai pelayan namun ternyata dia ditipu dan harus bekerja sebagai wanita penghibur, ketika sampai dia dinyatakan telah memiliki hutang dan harus terus bekerja

dibawah ancaman majikan jika tidak ia akan disiksa. Hari pertama tiba pun pada malam harinya RA harus langsung melayani tamu namun baru 2 minggu kerja RA dipindahkan ke majikan yang lain.

“Ketika saya tiba saya dinyatakan telah memiliki hutang 5 juta yen dan wajib mematuhi semua perintah mami, kecuali jika saya ingin disiksa seperti diestrum dan diberikan cabai. Karena takut saya terpaksa melayani tamu pada malam hari setelah saya tiba, tapi saya hanya bekerja disitu selama 2 minggu”

Mayoritas anak-anak perempuan dari Kecamatan Bongas

diperdagangkan ke Jakarta, Batam, Malaysia dan Bali. Akhir-akhir ini Bali menjadi daerah tujuan karena setiap wanita pekerja *sex* dapat bekerja tanpa mami/germo dan bebas. Germo yang menjadi majikan mereka pun tidak pernah kasar karena jika kasar tidak akan ada pekerja yang betah dan mau bekerja lama. Anak-anak perempuan yang diperdagangkan mayoritas menjadi pemuas hubungan *sex*. Orangtua tidak peduli dengan resiko kerja yang anak mereka alami tetapi orangtua akan senang karena anak mereka menghasilkan banyak uang.



Gambar Peta Alur Perdagangan Anak Perempuan di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu

Kekerasan yang anak-anak tersebut alami tidak hanya kekerasan seksual tetapi juga kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik bahkan ada juga yang

mengalami kekerasan kombinasi. Korban perdagangan anak RA mengalami kekerasan kombinasi yaitu kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi karena ia bekerja di bawah

ancaman germo dan korban penipuan selain itu ia juga mengalami kekerasan ekonomi karena uang bayarannya tidak diserahkan kepada RA. Tr dan S yang bekerja karena sukarela tidak pernah mendapat kekerasan dari germo, mereka kerap mendapat kekerasan seksual dari pelanggan.

Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan sebagai pemuas hubungan seksual pasti juga menghadapi stigma negatif dari masyarakat, tekanan sosial akibat pekerjaan yang mereka tekuni pasti mereka alami. Tidak ada anak yang mau bekerja sebagai wanita penghibur, orang dewasa yang berada disekitarnya yang mempengaruhi dan menjadikan mereka korban perdagangan anak selain itu, anak-anak juga tidak tahu resiko kerja mereka seandainya mereka bisa memilih pasti mereka tidak mau. Seperti pengakuan Tr yang menekankan bahwa tidak ada pilihan lain selain bekerja sebagai PSK berikut ini:

“Tidak ada penipuan saya masuk situ *real* kemauan saya, ya pengennya sih berumah tangga aja selayaknya punya anak, suami. Tapi karena masa lalu kita, masa-masa remaja kita keluarga kaya gitu, lingkungan juga jadi kitanya dibawa juga kaya gitu”.

KESIMPULAN

1. Orangtua ikut berperan dalam terjerumusnya anak kedalam *trafficking* mereka menganggap anak adalah asset.
2. *Trafficking* di Kecamatan Bongas sudah menjadi jalan pintas pemenuhan ekonomi

masyarakat, mayoritas menjadi wanita pekerja seks dan biasanya sudah turun temurun dari nenek, ibu atau kakaknya. Calo-calo juga banyak di Kecamatan Bongas sehingga mudah untuk melakukan perekrutan dan anak juga semakin mudah untuk terjat.

3. Motivasi untuk sekolah yang rendah dan pengaruh lingkungan tidak ada yang bersekolah hingga jenjang yang tinggi menjadi penyebab utama keterlibatan mereka dalam *trafficking* baik sebagai germo, calo, maupun korban.
4. Anak perempuan yang menjadi korban perdagangan mayoritas mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual banyak dialami anak-anak yang bekerja sebagai WPS ketika melayani pelanggan sedangkan kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi banyak dilakukan oleh germo/majikan yang memberikan ancaman jika anak tidak mau bekerja selain itu selama bekerja upah untuk anak tidak diberikan.
5. Pemberian hukuman bagi para oknum yang terlibat dalam *trafficking* belum maksimal, sehingga banyak yang tidak jera dan kembali lagi untuk terlibat dalam *trafficking*. Selain itu, kendala dalam penanganan *trafficking* adalah oknum yang terlibat merupakan keluarga korban

sehingga banyak kasus yang tidak berlanjut dipengadilan karena korban tidak ingin bersaksi untuk keluarganya. Masih adanya pihak kepolisian yang memanfaatkan situasi dengan meminta uang jaminan aman juga menjadi hambatan besar dalam menangani kasus *trafficking*.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pemerintah, instansi masyarakat dan pemangku kebijakan

1. Berkembangnya kasus *trafficking* di Kecamatan Bongas membutuhkan upaya penanganan lebih terutama di bidang pendidikan
2. Penerapan Indramayu REMAJA (Religius, Maju, Mandiri) harus lebih ditingkatkan.
3. Sosialisasi mengenai *trafficking* dan Undang-undang *Trafficking* yang dilakukan harus lebih menyeluruh dan mampu mengena hingga seluruh lapisan masyarakat.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

Penelitian ini masih perlu banyak perbaikan, disarankan untuk penelitian selanjutnya dengan tema sama mengalokasikan waktu lebih lama dalam sosialisasi dengan warga agar informasi yang didapat lebih beragam dan ketika wawancara sebaiknya ditemani warga setempat biasanya korban akan lebih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2012. *Indramayu dalam Angka*. Indramayu: Badan Pusat Statistika
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Pranada Media Group
- Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Undang-Undang Nomor 23. 2002. *Perlindungan Anak*